

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang berlokasi di Jalan Prabu Gajah Agung No.19, Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45621. Gedung pemerintahan bertingkat 3 lantai ini memiliki luas bangunan sebesar 7.883 m<sup>2</sup>, yang diresmikan pada tahun 2011 ini difungsikan sebagai tempat bekerjanya Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, memberikan pelayanan administratif, membina aparatur sipil negara di instansi daerah, serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tanggung jawabnya. Menurut (Peraturan Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, 2021) disebutkan bahwa tugas pokok dari Sekretariat Daerah adalah untuk membantu Bupati melaksanakan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Berdasarkan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dari jabatan tertinggi Sekretariat Daerah turunlah tiga asisten dengan tugas pokoknya masing-masing, sebagai berikut: 1). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 2). Asisten Perekonomian dan pembangunan, untuk turunan jabatan dari Sekretariat Daerah yang ke tiga adalah 3) Asisten Administrasi Umum.

Ruang kerja Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat akan dilakukan perancangan ulang pada interior ruang kerja divisi tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, karena proyek ini adalah proyek kerjasama Prodi Desain Interior Fakultas Industri Kreatif bekerjasama dengan Kantor Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Pada staff pemerintah Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat terbagi dalam empat bagian terdiri dari a). Bagian Tata Pemerintahan, b). Bagian Kesejahteraan Rakyat, c). Bagian Hukum, dan

d). Bagian Kerjasama yang memiliki tupoksi pada bagian kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan penyuluhan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat untuk meningkatkan upaya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan masyarakat. Dari tupoksi itu, fokus dalam membantu meningkatkan atau mengangkat lokalitas Sumedang memiliki tujuan sebagai alat untuk meningkatkan kebanggaan sebagai warga Kabupaten Sumedang dan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bagian di Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diperoleh informasi bahwa adanya keinginan untuk menghadirkan identitas dari Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Hal ini didasari karena intensitas tamu yang cukup banyak dari luar Sumedang bahkan dari luar Indonesia yang berkunjung untuk melakukan kerjasama atau kunjungan kerja sehingga menjadi persoalan dibutuhkannya penerapan simbolisme dari nilai lokalitas Sumedang pada interior Kantor Pemkab Sumedang. Nilai – nilai yang mencerminkan Pemerintah Kab. Sumedang ini yaitu nilai transparansi, bertanggung jawab dan efektif. Cara mengangkat lokalitas Sumedang yang bisa dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai atau visualisasi baik stilasi maupun metafora. Dari nilai-nilai yang tercerminkan dari Pemerintah Sumedang terdapat nilai-nilai lokalitas Sumedang yang selaras dengan nilai yang ada di pemerintahan maka dijadikan sebuah simbolisasi berupa media yang mengingatkan pada sebuah makna yang dijadikan sebagai referensinya. Maka simbolisasi dari lokalitas Sumedang dapat diterapkan di interior kantor Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai pengingat sebuah makna yang sudah ada di Sumedang. Selain itu simbolisasi dari Sumedang juga dapat menguatkan citra dari setiap Bagian di Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Setelah dilakukannya survey secara langsung ke Kantor Pemerintahan Kabupaten Sumedang ditemukan permasalahan umum dan khusus di ruang kerja. Permasalahan umum yang ada terkait dengan zoning blocking, penghawaan, dan akustik. Pada zoning blocking belum menerapkan nilai-nilai transparansi dan efektif pada layout zoning blocking,

misalnya pada zona publik yaitu ruang tamu serta ruang semi privat ruang kerja tercampur dalam ruang kerja staff dan ruang kerja eselon IV. Sehingga aktivitas kerja yang dilakukan oleh staff cukup terganggu karena intensitas tamu yang sering datang setiap hari nya ke ruang kerja hal tersebut diungkapkan oleh Kepala bagian Hukum, Ibu Hera. Menurut (Badan Standarisasi Nasional, 2001) setiap ruangan harus memiliki luasan bukaan ventilasi sebesar  $< 5\%$  dari luas total ruang sementara pada system penghawaan masih kurang sesuai karena pada ruang kepala bagian kesejahteraan rakyat tidak mendapatkan system penghawaan dari ventilasi alami maupun penghawaan buatan. Sementara untuk permasalahan khusus melalui permintaan dari hasil kuesioner yang disebar ke para Kabag hingga staff adalah sebanyak 97,4% dari hasil kuesiner menjawab bahwa diperlukannya pengimplementasian lokalitas Sumedang agar ruang kerja memiliki ciri khas yang menggambarkan identitas dari Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga untuk meningkatkan citra Kabupaten Sumedang. Ada pula permintaan dari pengguna yaitu dijelaskan oleh Ibu Hera selaku Kepala Bagian Hukum yang meminta agar adanya ruang meeting yang memenuhi kapasitas pengguna dan keinginan lainnya yaitu dibuat nya tempat kerja staff yang memudahkan aktivitas diskusi saat kerja dan ruang kerja yang terbuka untuk membantu staff agar bekerja lebih produktif dan efektif.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka perancangan dari Kantor Pemerintahan Sumedang ini bertujuan agar dapat membuat ruang kerja Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan fasilitas interior yang bisa menjadi pengingat dari sebuah makna lokalitas masyarakat Sumedang yang memenuhi kebutuhan para pengguna ruang dengan menganalisa dan penggabungan dari standarisasi. Selain bertujuan untuk merancang interior kantor yang memenuhi kebutuhan pengguna juga untuk mengenalkan makna lokalitas Sumedang secara simbolis pada pengolahan elemen interior agar ruang kerja dapat menampilkan identitasnya dan juga menjadi sebuah media untuk menguatkan citra dari Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil survey, observasi secara langsung hingga latar belakang yang telah dijabarkan pada literatur, berikut ini merupakan identifikasi masalah yang ditemukan:

### A. Organisasi Ruang dan Layout

Penataan layout eksisting untuk zoning blocking pada kantor Pemerintahan Kabupaten Sumedang belum mensimbolkan nilai-nilai dari Pemerintahan Sumedang yang memiliki nilai transparansi, responsif, efektivitas dan efisien dalam kegiatan pelayanan publik.

### B. Persyaratan Umum Ruang

1. Furniture pada ruang kerja masih kurang bervariasi dan secara fungsi fasilitas masih kurang memaksimalkan jenis furniture *built-in* dan furniture *loose*.
2. Penataan furniture yang belum diperhatikan dengan kebutuhan ruang. Misalnya pada ruang kerja Bagian Hukum yang masih menggunakan meja kerja *cubicle* dan penempatan lemari besi yang tidak teratur ini membuat mobilitas para staff pada ruangan tersebut menjadi tidak efisien.
3. Pada ruang kepala bagian kesejahteraan rakyat penghawaan alami tidak terpenuhi karena letak ruangan yang terapat dengan ruangan lainnya dan untuk penghawaan buatan pun tidak tersedia pada ruangan tersebut. Sehingga penghawaan di ruangan ini tidak sesuai dengan standar yang seharusnya memilisi bukaan ventilasi sebesar  $< 5\%$  dari luasan total ruang menurut SNI 03-6572-2001.
4. Pada beberapa area ruang kerja yang letaknya berada di dekat area pendopo yang difungsikan sebagai tempat dilaksanakannya berbagai acara ini memiliki system akustik yang kurang diperhatikan, hal tersebut mengakibatkan kebisingan eksternal yang didapatkan pada beberapa ruang kerja. Sehingga diperlukannya treatment akustik pada area ruang kerja.

### **C. Konsep/Karakter Ruang**

1. Konsep ruang interior bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ini ingin dirancang ulang bagian interior ruang kerja dengan menampilkan identitas dan menyatukannya dengan nilai lokalitas Sumedang agar membantu memberikan nilai lokalitas pada interior ruang kerja bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
2. Konsep bentuk pada ruangan masih kurang mengimplementasikan simbolisasi dari perancangan. Bentuk datar dan grid dominan tanpa adanya permainan bentuk yang lebih atraktif pada ruangan.
3. Konsep warna pada ruangan belum bisa mensimbolkan dari nilai pemerintahan.

#### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil penjabaran dari idenfikasi masalah maka dapat diringkas menjadi sebuah rumusan masalah dari perancangan ulang interior Kantor Pemerintahan Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Bagaimana cara untuk menata ulang zoning blocking pada interior kantor Pemerintahan Sumedang yang mengimplementasikan nilai yang?
2. Bagaimana cara merancang ruang kerja bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang memenuhi persyaratan umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.45 tahun 2007?
3. Bagaimana cara untuk menerapkan identitas divisi pada interior ruang kerja yang mendukung suasana setiap bagian melalui unsur lokalitas Sumedang yang sesuai dengan pendekatan desain?

#### **1.4. Tujuan dan Sasaran Perancangan**

##### **1.4.1. Tujuan Perancangan**

Tujuan dari perancangan ini untuk mendesain ulang interior Kantor Pemerintahan Kabupaten Sumedang pada Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan menghadirkan identitas Divisi yang dikomunikasikan melalui

lokalitas Sumedang pada interior kantor yang menerapkan nilai-nilai baik stilasi maupun metafora. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan para pengguna berdasarkan hasil Analisa dan penggabungan dari standarisasi.

#### **1.4.2. Sasaran Perancangan**

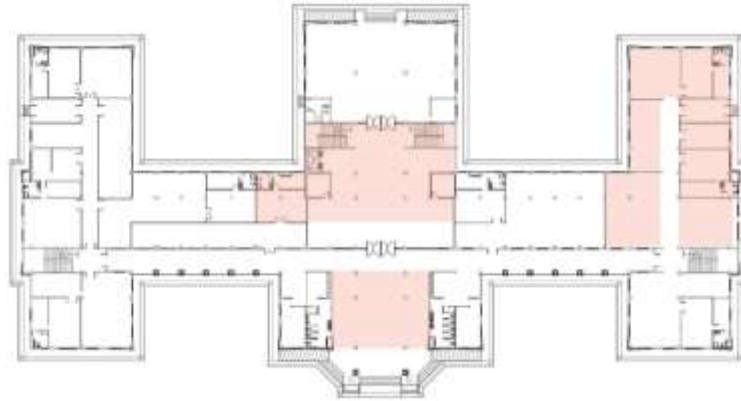
Sasaran dari perancangan Kantor Pemerintahan Kabupaten Sumedang ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang ruang interior kantor pemerintahan Kabupaten Sumedang pada divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Interior ruang kerja Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat menghadirkan identitas Divisi serta memenuhi kebutuhan para pengguna ruang;
3. Merancang dan mendesain interior kantor Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan konsep lokalitas Sumedang sebagai simbolisasi identitas diri sebagai wujud pelestarian lokalitas Sumedang.
4. Memudahkan para pengguna dalam melakukan aktivitas kerja di ruang kerja.

#### **1.5. Batasan Perancangan**

Sebuah ide dari perancangan terdapat beberapa batasan-batasan yang perlu diperhatikan, berikut merupakan batasan-batasan dari perancangan ini:

1. Objek desain pada lingkup ruang kerja divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Luasan Kantor Pemerintahan Kabupaten Sumedang 7.883 m<sup>2</sup>
3. Luasan ruang kerja Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1.027,5 m<sup>2</sup>



Gambar 1. 1 Denah Eksisting

Sumber: Data Pribadi

4. Area perancangan meliputi ruang *lobby*, *creative center*, ruang kerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan, ruang kerja Staff Bagian Tata Pemerintahan, ruang meeting Bagian Tata Pemerintahan, ruang kerja Kepala Bagian Hukum, ruang kerja Staff Bagian Hukum, Ruang meeting dan perpustakaan Bagian Hukum, ruang Kerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, ruang kerja Staff Bagian Kesejahteraan Rakyat, ruang kerja Kepala Bagian Kerjasama, ruang kerja Staff Bagian Kerjasama, ruang isoma di setiap ruang bagian.

## 1.6. Manfaat Perancangan

### 1.6.1. Bagi Perancang

Manfaat bagi mahasiswa atau perancang adalah dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman mengenai perancangan kantor pemerintah khususnya pada Kantor Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang pada Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Manfaat lain bagi mahasiswa sebagai referensi dan portfolio akademis dalam bidang perancangan kantor.

### 1.6.2. Bagi Institusi Pendidikan

Manfaat bagi institusi pendidikan adalah dapat dijadikan sebagai koleksi karya perancangan interior Kantor Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang pada Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

### **1.6.3. Bagi Pemerintah**

Manfaat bagi pemerintah adalah sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas pembangunan sarana dan pelayanan masyarakat dalam bidang desain interior yang efisien dan sesuai dengan anggaran.

## **1.7. Metode Penelitian**

Tahapan pengumpulan data dalam perancangan ulang dari objek tugas akhir ini dilakukan dengan dua metode yaitu data primer dengan beberapa tahapan seperti penentuan objek, observasi, wawancara, dokumentasi, studi lapangan. Metode lainnya yaitu dari data sekunder dengan menggunakan studi literatur sebagai acuan dalam melakukan perancangan.

### **1. Penentuan Objek**

Penentuan objek berdasarkan dengan fenomena isu yang terjadi di Kantor Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Fenomena dan isu yang terjadi ini dijadikan sebagai latar belakang mengapa perancangan ini dilakukan dan batasan masalah diambil dari divisi yang dipilih berdasarkan fenomena dan isu yang sedang terjadi.

### **2. Studi Literatur**

Penyusunan penulisan laporan perancangan, yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan salah satu caranya yaitu studi literatur terkait dengan objek perancangan. Data literatur didapat dari peraturan pemerintah, jurnal, artikel, dan referensi buku-buku ataupun ebook yang ada.

### **3. Observasi**

Observasi dilakukan dengan cara mendatangi dan penulis melakukan kegiatan volunteer selama 7 hari di Kantor Sekda Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jl. Prabu Gajah Agung No.19, Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621. Observasi bertujuan untuk memperoleh data mengenai data eksisting, fasilitas, aktivitas user dan elemen interior yang digunakan juga dibutuhkan untuk desain terkait dengan identifikasi masalah yang didapatkan.

#### **1. Dokumentasi**



Maksud penggunaan metode ini adalah agar dapat mendokumentasikan data visual berupa foto, video, dan rekaman suara dari interior, user dan objek-objek yang ada untuk melengkapi data yang diperoleh dan sebagai bukti dari hasil observasi dan wawancara dengan mempergunakan alat (kamera).

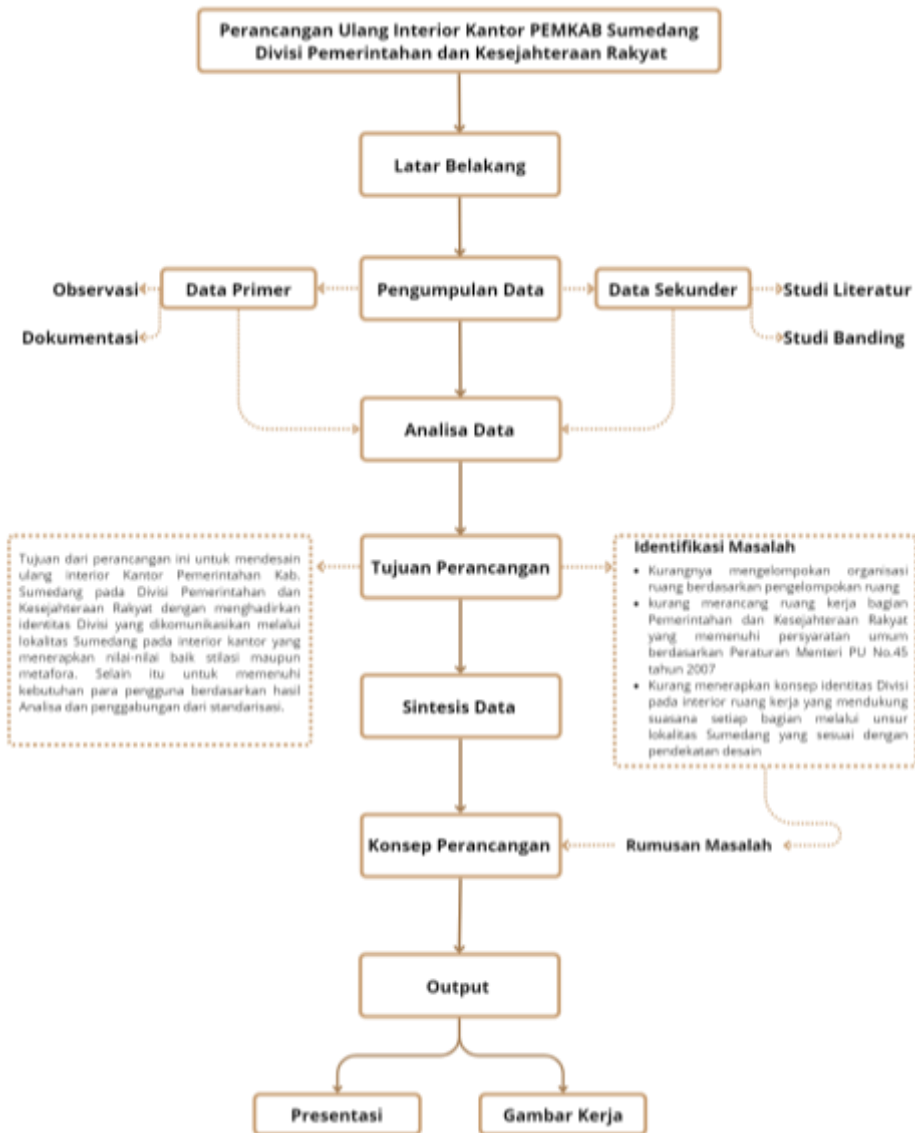
## 2. Wawancara

Tahapan wawancara dilakukan pada Kepala Bagian Hukum yaitu Ibu Hera Irawati, Kepala Sub.Bagian Kesejahteraan Rakyat bidang Pendidikan Ibu Iis Lisnarita, Kepala Sub.Bagian Kerjasama Bapak Hendra Purwadhi dan Kepala Sub.Bagian Tata Pemerintahan Bapak ... dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang bertujuan untuk lebih mengetahui objek perancangan dari segi kegiatan yang dilakukan oleh setiap bagian, karakter atau kebiasaan dari setiap bagian, serta masalah-masalah yang terjadi secara mendetail.

## 3. Menganalisis data

Mengolah data setelah mendapatkan hasil data literatur, hasil observasi, hasil dokumentasi, data hasil wawancara yang terkait untuk menganalisa permasalahan dan solusi dari data yang sudah di dapatkan dan diolah menjadi perancangan.

## 1.8. Kerangka Berpikir



Gambar 1. 2 Bagan Kerangka Berikir

Sumber: Dokumen Pribadi

## **1.9. Sistematika Pembahasan**

Tugas Akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **A. BAB I PENDAHULUAN,**

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi & perumusan masalah, batasan perancangan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

### **B. BAB II KAJIAN LITERATUR,**

Bab ini berisi kajian mengenai standarisasi peruang, yan dibutuhkan untuk menganalisis existing.

### **C. BAB III DATA ANALISIS DAN STUDI PRESEDEN,**

Berisikan hasil analisis exting pada Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 1 Menganti, serta studi preseden yang dilakukan dengan studi banding sekolah kreatif lainnya.

### **D. BAB IV TEMA, KONSEP PERANCANGAN DAN APLIKASI PERANCANGAN**

Bagian ini berisi penjabaran tema, konsep dan aplikasi perancangan dalam perancangan ulang Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 1 Menganti.

### **E. BAB V KESIMPULAN,**

Berisikan rangkuman dari temuan permasalahan, analisis masalah, hingga jenis penyelesaian yang diajukan.